

INDEKS DEMOKRASI

Provinsi	Tahun	Kebebasan Sipil	Hak – Hak Politik	Lembaga Demokrasi
ACEH	2020	84.49	64.94	74.91
SUMATERA UTARA	2020	77.33	60.27	57.52
SUMATERA BARAT	2020	66.59	66.8	90.91
RIAU	2020	86.08	65.4	83.46
JAMBI	2020	82.71	62.98	86.45

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.

Sumber Data : Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Menurut Aspek dan Provinsi .diakses pada tanggal 12 Desember 2022 melalui laman bps.go.id

DESKRIPSI DATA

	year	kebebasan_sipil	hak_politik	lembaga_demokrasi
count	346.000000	346.000000	346.000000	346.000000
mean	2015.534682	82.791618	60.920896	72.640145
std	2.872197	10.672691	12.307354	10.332326
min	2011.000000	47.210000	28.950000	47.250000
25%	2013.000000	77.722500	51.030000	65.372500
50%	2016.000000	84.335000	62.580000	72.890000
75%	2018.000000	91.097500	68.805000	80.420000
max	2020.000000	100.000000	86.520000	93.980000

A. Deskripsi Data

Dataset Indeks Demokrasi seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2011 – 2020 merupakan data penyusun Indeks Demokrasi yang terdiri dari 3 aspek, yaitu Kebebasan Sipil, Hak – Hak politik dan Lembaga Demokrasi. Dataset yang diakses dari bps.go.id merupakan data yang lengkap dan valid, karena seluruh data merupakan data decimal, semua angka berada pada rentang nilai 0 – 100 dan tidak ada data Null/kosong.

Aspek – aspek penyusun Indeks Demokrasi memiliki nilai statistik deskriptif sebagai berikut :

1. Aspek Kebebasan Sipil :

a. Mean : 82,79

Nilai rata – rata aspek kebebasan sipil berada pada angka 82,79 dari nilai 100, menunjukkan aspek kebebasan sipil seluruh provinsi di Indonesia relative baik.

b. Nilai Minimum : 47,21

Nilai terendah aspek kebebasan sipil berada pada angka 47,21 dari nilai 100 yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2014.

c. Nilai Maksimum : 100

Nilai tertinggi aspek kebebasan sipil berada pada angka 100 dari nilai 100 yang terjadi di Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2016.

d. Standar Deviasi : 10,67

Simpangan baku aspek kebebasan sipil berapa pada angka 10,67 yang menunjukkan bahwa nilai rentang simpangan data masih relative kecil.

2. Aspek Hak – Hak Politik :

a. Mean : 60,92

Nilai rata – rata aspek hak – hak politik berada pada angka 60,92 dari nilai 100, menunjukkan aspek kebebasan sipil seluruh provinsi di Indonesia relative rendah.

b. Nilai Minimum : 28,95

Nilai terendah aspek hak – hak politik berada pada angka 28,95 dari nilai 100 yang terjadi di Provinsi Sulawesi Tenggara pada Tahun 2013.

c. Nilai Maksimum : 86,52

Nilai tertinggi aspek kebebasan sipil berada pada angka 86,52 dari nilai 100 yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2019.

d. Standar Deviasi : 29,85

Simpangan baku aspek kebebasan sipil berapa pada angka 29,85 yang menunjukkan bahwa nilai rentang simpangan data relative lebih besar jika dibandingkan dengan aspek kebebasan sipil.

3. Aspek Lembaga Demokrasi :

a. Mean : 72,64

Nilai rata – rata aspek hak – hak politik berada pada angka 72,64 dari nilai 100, menunjukkan aspek kebebasan sipil seluruh provinsi di Indonesia relative rendah jika dibandingkan dengan aspek kebebasan sipil dan lebih tinggi jika dibandingkan aspek hak – hak politik.

b. Nilai Minimum : 47,25

Nilai terendah aspek hak – hak politik berada pada angka 47,25 dari nilai 100 yang terjadi di Provinsi Maluku Utara pada Tahun 2014.

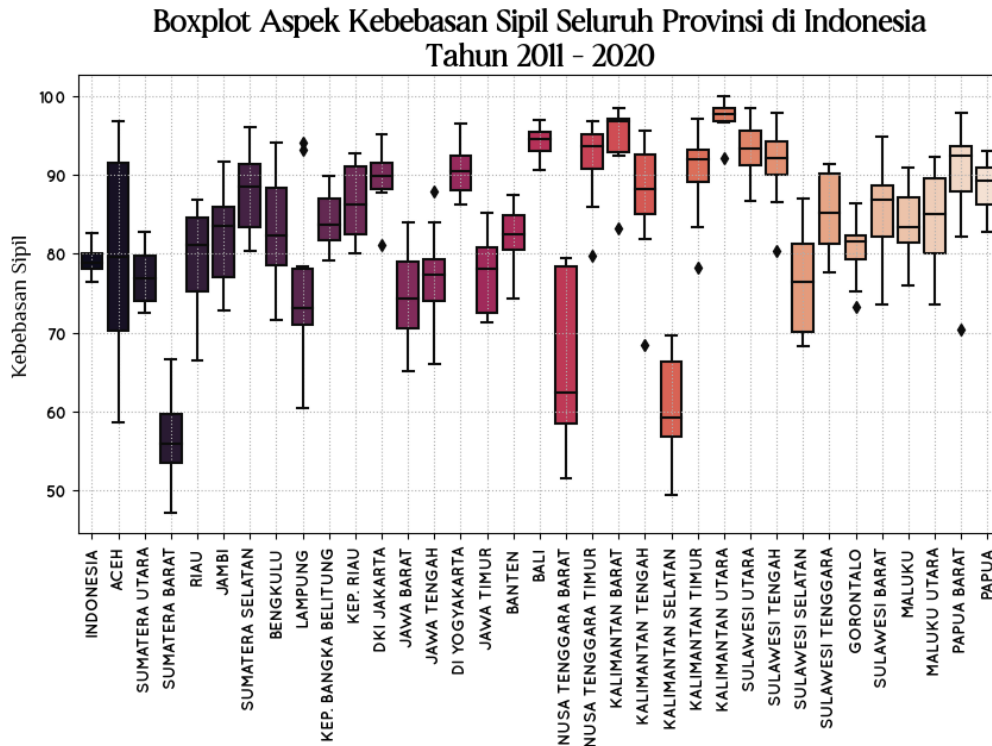
c. Nilai Maksimum : 93,98

Nilai tertinggi aspek kebebasan sipil berada pada angka 93,98 dari nilai 100 yang terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2017.

d. Standar Deviasi : 10,33

Simpangan baku aspek kebebasan sipil berapa pada angka 10,33 yang menunjukkan bahwa nilai rentang simpangan data relative lebih kecil jika dibandingkan dengan aspek hak – hak politik dan aspek kebebasan sipil .

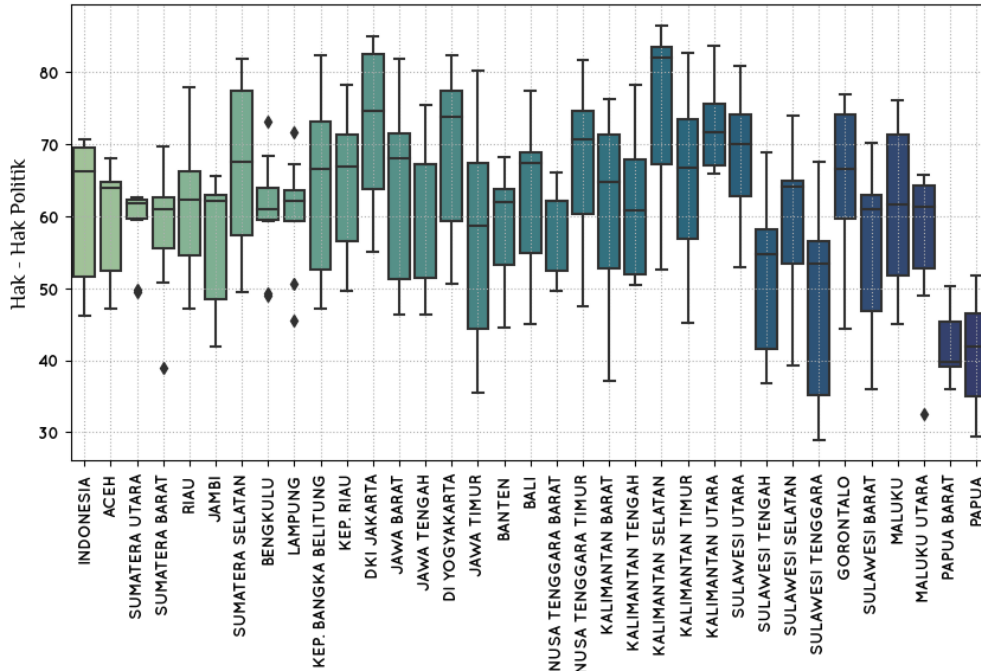
Setiap aspek penyusun Indeks Demokrasi memiliki sebaran data yang beragam, yaitu :



A. Aspek Kebebasan Sipil :

Pada aspek kebebasan sipil terdapat beberapa data pencilon atau data yang ekstrim yaitu data yang terpaut jauh dari data lainnya. Beberapa data pencilon pada provinsi dan tahun tertentu menunjukkan bahwa kemungkinan terdapat anomali, data tersebut kurang valid atau kemungkinan terdapat manipulasi data.

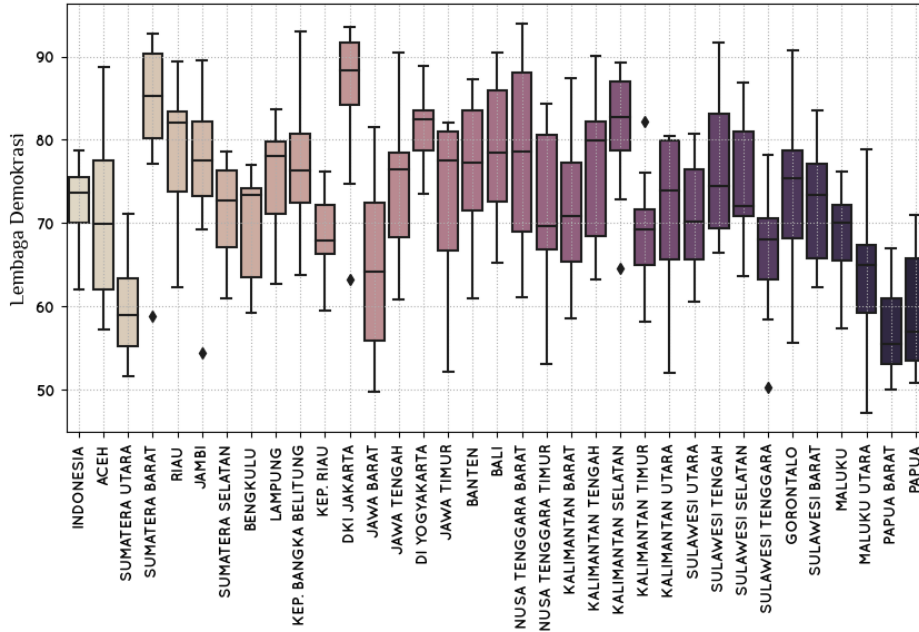
Boxplot Aspek Hak - Hak Politik Seluruh Provinsi di Indonesia
Tahun 2011 - 2020



B. Aspek Hak - Hak Politik :

Pada aspek hak - hak politik terdapat beberapa data pencilan atau data yang ekstrim yaitu data yang terpaut jauh dari data lainnya. Beberapa data pencilan pada provinsi dan tahun tertentu menunjukkan bahwa kemungkinan terdapat anomali, data tersebut kurang valid atau kemungkinan terdapat manipulasi data.

Boxplot Aspek Lembaga Demokrasi Seluruh Provinsi di Indonesia
Tahun 2011 - 2020



C. Aspek Lembaga Demokrasi :

Pada aspek Lembaga demokrasi terdapat beberapa data pencilan atau data yang ekstrim yaitu data yang terpaut jauh dari data lainnya. Beberapa data pencilan pada provinsi dan tahun tertentu menunjukkan bahwa kemungkinan terdapat anomali, data tersebut kurang valid atau kemungkinan terdapat manipulasi data.